



RANHIR RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PONDOKGEDE
2025 - 2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	8
1.3.1. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi.....	12
1.3.2. Hubungan Renstra Kecamatan dengan Rencana Strategis K/L.....	13
1.3.3. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L Dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.....	15
1.3.4. Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan Dokumen Lainnya.....	16
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	18
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	24
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	28
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	50
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	54
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	79
BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN	
PONDOKGEDE.....	108
3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PONDOKGEDE.....	108
3.1.1 TUJUAN KECAMATAN PONDOKGEDE.....	112
3.1.2 SASARAN KECAMATAN PONDOKGEDE.....	112
3.2. STRATEGI KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025-2029.....	117
3.3. ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025-2029.....	128
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN,DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	137
4.1. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS.....	165
4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	179
BAB V PENUTUP	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Rencana Strategis dengan RPJMD Kota Bekasi Antar Dokumen Perencanaan	11
Gambar 2. Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L dan RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan.....	15
Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Pondokgede.....	29
Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Pondokgede	38
Gambar 5. SOP Fasilitas Perekaman KTP Elektronik / E-KTP pada Kecamatan Pondokgede	46
Gambar 6. SOP Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan.....	47
Gambar 7. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP dan SMA).....	48
Gambar 8. SOP Pengantar Izin Rame-Rame	49
Gambar 9. Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan.....	108
Gambar 10. Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jawa Barat.....	109
Gambar 11. Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	110
Gambar 12. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2030.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Isi Standar Operasional (SOP) Kecamatan Pondokgede	44
Tabel 2	Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokgede.....	50
Tabel 3	Jumlah pegawai Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025	51
Tabel 4	Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede yang menduduki jabatan dan staf tahun 2025	51
Tabel 5	Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2025	52
Tabel 6	Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan pendidikan tahun 2025	52
Tabel 7	Jumlah PPPK & Non ASN Kecamatan Pondokgede berdasarkan pendidikan tahun 2025.....	43
Tabel 8	Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Pondokgede	54
Tabel 9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berdasarkan Rencana Strategis Perubahan 2018-2023.....	58
Tabel 10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026.....	59
Tabel 11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2019-2020	62
Tabel 12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2021-2022	69
Tabel 13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2023-2024	74
Tabel 14	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondokgede	94
Tabel 15	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029.....	113
Tabel 16	Matriks Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede dan Cascading Kinerja Kecamatan Pondokgede.....	114
Tabel 17	Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.....	122
Tabel 18	Formulasi Strategi SWOT.....	124
Tabel 19	Strategi Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede.....	127
Tabel 20	Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede.....	129
Tabel 21	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	132
Tabel 22	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029.....	140
Tabel 23	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	167
Tabel 24	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030	179
Tabel 25	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030	180

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi dan misi walikota dan Rencana Straregis ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah antara lain: persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Pondokgede juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Bekasi, 29 Agustus 2025
CAMAT PONDOKGEDE,

LAJAL ABIDIN SYAH, S.T., M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.19720616 199903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota terpilih yang memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat Daerah, Program Kewilayahan, Rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi yang bersifat Indikatif, dan Rencana Kerja dalam Kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan implementasi dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, yang didasarkan pada RPJPD Kota Bekasi 2025-2045. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Memperhatikan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede merupakan implementasi dan aktualisasi atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan yang nantinya dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede pada tiap tahunnya, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede dapat berjalan dengan baik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain, Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Penyusunan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pondokgede untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede;
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede ;dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/kota.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

13. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi No 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Penggarustamaan Gender Tahun 2024-2028;
29. Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/979/BAPPELITBANGDA AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede diuraikan sebagai berikut : Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pondokgede, baik evaluasi Rencana Strategis (Renstra) maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) tersebut harus mempunyai kebijakan, strategis dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial kecamatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan mulai tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

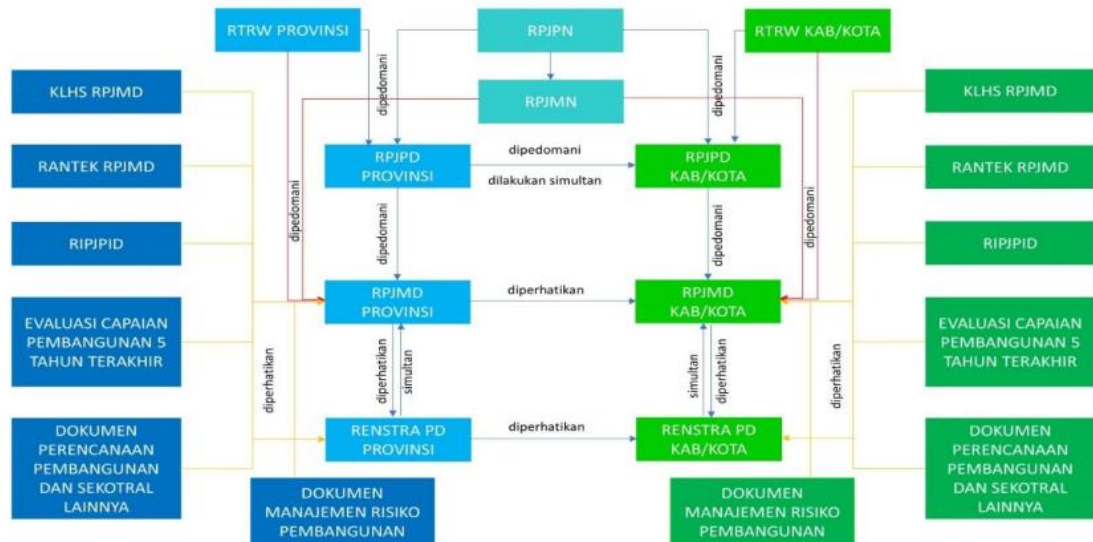
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029. Renstra Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Kecamatan Pondokgede untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Rencana Strategis dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Kecamatan Pondokgede merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede dapat berjalan dengan baik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dengan Demikian Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan Strategis.

Gambar 1. Keterkaitan Rencana Strategis dengan RPJMD Kota Bekasi Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, diolah

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi

Hubungan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra Kecamatan Pondokgede adalah bahwa RPJMD Kota Bekasi menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2025-2029 disusun secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029, namun dikarenakan dokumen RPJPD Kota Bekasi yang menjadi acuan akan berakhir pada Tahun 2025 dan akan dirancang RPJPD tahun 2025-2045 dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Renstra ini disusun secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

1.3.2 Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Pondokgede akan selalu bersinergi dan saling antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

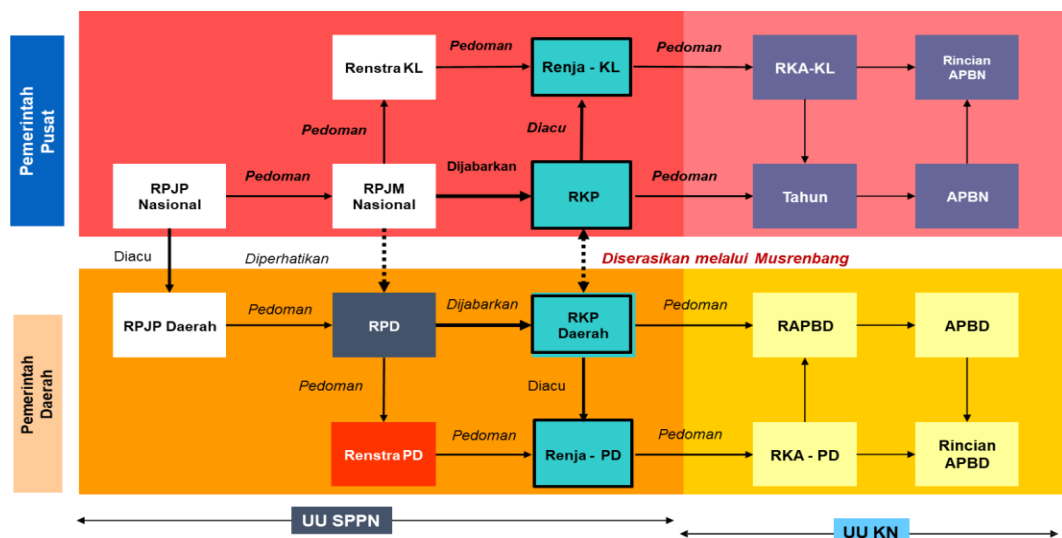
Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2026 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis tiga tahun sebelumnya, kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 (lima) Tahun ke depan, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.3 Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L dan RPJMD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Pondokgede akan selalu bersinergi dan saling antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah. Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L dan RPJMD Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan RDJMD, Rencana Strategis K/L dan RJPMD Provinsi/ Kabupaten/Kotadan dengan Renja Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.3.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede dengan dokumen lainnya

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025- 2029;
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dalam hal pelayanan publik di Kecamatan berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuanserta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 mempertimbangkan pokok-pokok arah kebijakan dalam RJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 karena wilayah Kecamatan Pondokgede yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede;
- Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran umum rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029, yang disusun berdasarkan Visi Misi, arah kebijakan dan Program Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RJMPD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondokgede;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokgede dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan lingkungan strategis; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede;
2. Mengoperasionalkan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sesuai dengan kaidah perencanaan;
3. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kecamatan Pondokgede setiap tahunnya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Menyelaraskan Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede;
7. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian kinerja sebagai landasan tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan Pondokgede;
8. Menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede;
9. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja kecamatan; dan
10. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede 2025-2029 disusun dengan sistematika Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2. Dasar Hukum, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah dan Peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan Perangkat Daerah;
- 1.3. Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 1.5. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasa dalam penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan susunan garis besar isi Dokumen Rencana Strategis.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menguraikan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, memuat struktur organisasi Perangkat Daerah dan tugas, fungsi Perangkat Daerah, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber daya Perangkat Daerah, menguraikan Sumber Daya Manusia mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraikan menurut jenis kelamin, aset/modal, fasilitas Perangkat Daerah lengkap dengan keterangan kondisi dan unit yang masi operasional;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencaipan kinerja pelayanan dan anggaran Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya, dan interpretasi capaian kinerja antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tindaknya kesejangan/gap pelayanan. Pelayanan yang memiliki target yang telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana yang belum mencapai tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- 2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.5. Penentu Isu-isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil Isu-isu Strategis;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 3.4. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi Perangkat Daerah;
- 3.5. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- 3.6. Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**BAB IV : PROGAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1. Uraian Program, memuat program yang diselenggarakan sebagai acuan dari penyelenggaraan pemerintahan;
- 4.2. Uraian Kegiatan, memuat kegiatan yang diselenggarakan sebagai acuan dari penyelenggaraan pemerintahan;
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan,kinerja, indikator,target dan pagu indikatif yang mendukung kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan;
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program pembangunan daerah;
- 4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja (IKK).

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan Subtansial , kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi rencana pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan .

Kecamatan Pondokgede, sebagai bagian dari wilayah Kota Bekasi, yang menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik terhadap masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Pondokgede. Pelayanan-pelayanan ini mencakup urusan administrasi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Secara umum gambaran pelayanan di Kecamatan Pondokgede bertujuan untuk :

- Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat;
- Mendorong Pembangunan Daerah di berbagai bidang;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

Jenis-Jenis Pelayanan yang tersedia di Kecamatan Pondokgede

Untuk gambaran umumnya Kecamatan Pondokgede memiliki berbagai jenis-jenis pelayanan, antara lain :

- **Pelayanan Administrasi Kependudukan** : Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- **Pelayanan Ekonomi** : Pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memfasilitasi perdagangan dan investasi;
- **Pelayanan Perizinan** : Pengurusan Izin usaha, izin lainnya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- **Pelayanan Infrastruktur** : Pemeliharaan Jalan/Saluran Lingkungan, Pengelolaan sampah, Penerangan Jalan Umum dan Penyediaan Air Bersih;
- **Pelayanan Sosial** : Pelayanan Kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede, serta pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas;
- **Pelayanan Keamanan dan Ketertiban** : Koordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI dan instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang berada di wilayah Kecamatan Pondokgede;

Fasilitas Pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Pondokgede

Untuk mendukung penyelenggaraan dalam hal pelayanan publik di Kecamatan Pondokgede di lengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain :

- **Kantor Kecamatan Pondokgede** : yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- **Kantor Kelurahan** : yang berfungsi sebagai unit pelayanan publik di wilayah kecamatan, yang lebih dekat dengan masyarakat;
- **Puskesmas dan Posyandu** : yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan yang berada di wilayah kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- **Sekolah-Sekolah** : yang berfungsi sebagai unit pelayanan pendidikan formal yang berada di wilayah Kecamatan;
- **Pasar dan Pusat Perbelanjaan** : yang berfungsi sebagai unit pelayanan dalam ekonomi yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;
- **Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum Lainnya** : yang berfungsi sebagai pelayanan sosial dalam rangka kegiatan sosial dan rekreasi masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tantangan dan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan

Meskipun berbagai jenis pelayanan telah tersedia, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan, antara lain :

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia** : Jumlah dan kompetensi petugas pelayanan yang perlu ditingkatkan;
- **Keterbatasan anggaran** : Alokasi dana yang terbatas untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan;
- **Keterbatasan Infrastruktur** : Kondisi Fasilitas Pelayanan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan;
- **Tingginya Harapan Masyarakat** : Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan pelayanan tersebut, berbagai upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Pondokgede, antara lain :

- **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**: Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan.
- **Pemanfaatan teknologi informasi**: Untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
- **Peningkatan sarana dan prasarana**: Perbaikan dan pembangunan fasilitas pelayanan yang lebih memadai.
- **Peningkatan partisipasi masyarakat**: Melalui survei kepuasan pelanggan dan forum-forum dialog.
- **Pengembangan sistem pelayanan terpadu**: Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai jenis layanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pelayanan di Kecamatan Pondokgede agar terus meningkat kualitasnya dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1. TUGAS,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

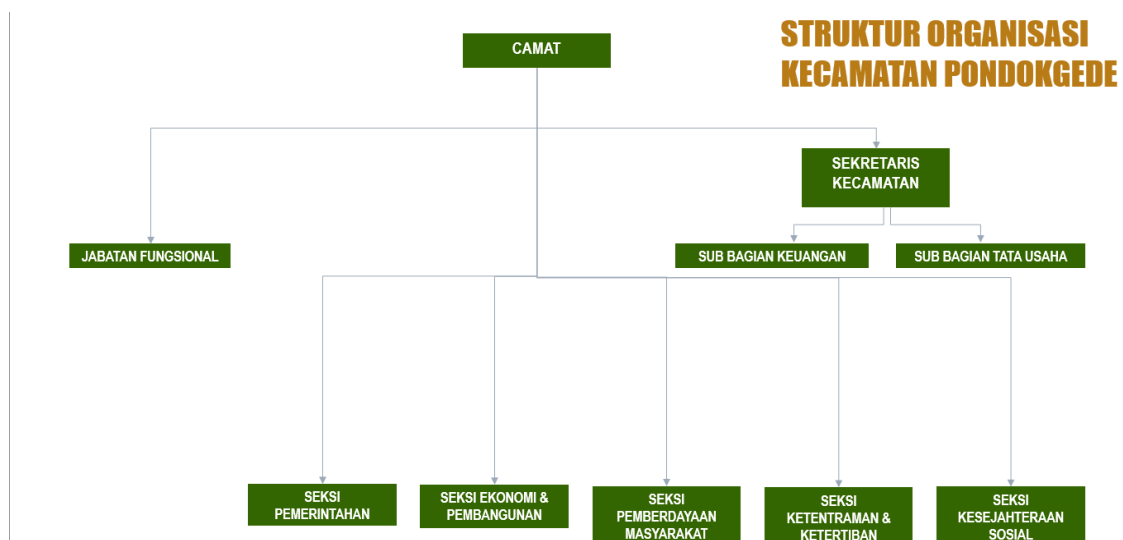
Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Peraturan tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi Peraturan Daerah Kota Bekasi, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Pondokgede

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pondokgede

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.1.1. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan.

Fungsinya :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.1.2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.1.3. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2.1.1.4. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umumdi Kecamatan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.6. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.7. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.1.8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

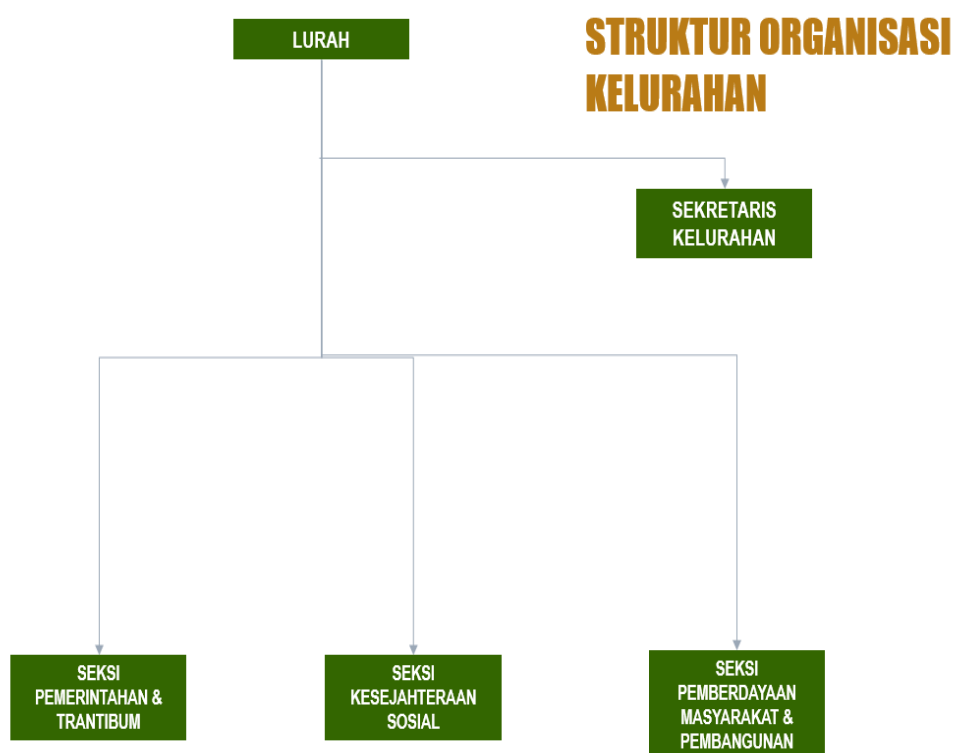
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi Lurah dibantu oleh Sekretaris Kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik serta didukung oleh 3 (tiga) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Pondokgede

Sumber : Kecamatan Pondokgede

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.2. LURAH

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan Renstra dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
3. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
5. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
8. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
9. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
10. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
11. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kelurahan;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
13. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
14. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.2.1. SEKRETARIS KELURAHAN

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.2.2. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- k. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.2.3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.2.4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi. Maka dari itu Kecamatan dalam mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mempunyai beberapa SOP pelayanan diantaranya dijelaskan pada gambar dibawah ini.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 1. Daftar Isi Standar Operasional (SOP)
Kecamatan Pondokgede**

NO	SOP	NOMOR SOP	TANGGAL SOP
A	KEPEGAWAIAN		
1	SURAT MASUK	800/042-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
2	SURAT KELUAR	800/042.a-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
3	USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL	800/042.b-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
4	USULAN PERMOHONAN CUTI PEJABAT STRUKTURAL	800/042.c-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
5	PERSETUJUAN CUTI APARATUR	800/042.d-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
6	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN	800/042.e-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
7	PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PNS	800/042.f-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
8	USULAN KENAIKAN PANGKAT	800/042.g-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
9	PERMOHONAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS	800/042.h-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
10	USULAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU	800/042.i-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
B	PERENCANAAN		
1	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	800/042.j-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
2	PENYUSUNAN RENCANA KERJA	800/042.k-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
3	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	800/042.l-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
C	KEUANGAN		
1	PENGAJUAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	800/042.m-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
2	PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)	800/042.n-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
3	PENGAJUAN SPM LANGSUNG (LS)	800/042.o-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
4	PENGAJUAN SPM TAMBAH UANG (TU)	800/042.p-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
5	PENGAJUAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)	800/042.q-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
6	PENGELOLAAN PENYETORAN, PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PERIJINAN REKLAME DAN IMB	800/042.r-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
7	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	800/042.s-Kc.PG-Set	9 Januari 2018

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	SOP	NOMOR SOP	TANGGAL SOP
D	TEKNIS		
1	PENCAIRAN HONORARIUM KINERJA RT DAN RW	800/042.t-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
2	PERMOHONAN PERALIHAN HAK TANAH	800/042.u-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
3	PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN WARIS	800/042.v-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
4	PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)	800/042.w-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
5	PENERBITAN KTP-EL	800/042.x-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
6	SURAT KETERANGAN PINDAH	800/042.y-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
7	PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL	800/042.z-Kc.PG-Ekbang	9 Januari 2018
8	PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	800/042.aa-Kc.PG-Ekbang	9 Januari 2018
9	SURAT KETERANGAN IJIN TETANGGA	800/042.ab-Kc.PG-Trantib	9 Januari 2018
10	PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA (SKDU)	800/042.ac-Kc.PG-Trantib	9 Januari 2018
11	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA IMAM MARBOT	800/042.ad-Kc.PG-Kesos	9 Januari 2018
12	PELAYANAN DOMISILI YAYASAN	800/042.ae/-Kc.PG-Kesos	9 Januari 2018
13	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA MUB	800/042.af-Kc.Pg.PG-Kesos	9 Januari 2018
14	INSENTIF KADER PKK, POSYANDU DAN PKP	800/042.ag-Kc.PG-Permas	9 Januari 2018
15	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	800/042.ah-Kc.PG-Permas	9 Januari 2018
16	PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS (P3BK)	800/042.ai-Kc.PG-Permas	9 Januari 2018

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK / E-KTP
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima kelengkapan berkas permohonan			1 Pengantar RT/RW 2 KTP atau KK 3 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit	Dokumen lengkap	
	b memeriksa berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas lengkap akan di proses Perekaman data diri yang langsung masuk ke data base Kemendagri				15 Menit	Hasil Perekaman Data diri dikirim melalui Jaringan Satelit untuk proses pencetakan e-KTP oleh pihak Kemendagri	
2	Menerima e-KTP yang telah jadi untuk didata sesuai dengan jumlah yang ada di konsorium			KTP elektronik yang sudah tercetak	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman	
3	Menyerahkan e-ktip ke Kelurahan untuk didistribusikan ke pemohon melalui RT/RW			KTP elektronik yang sudah tercetak	5 menit	Tanda terima	

Gambar 5. SOP Fasilitasi Perekaman KTP Elektronik / E-KTP pada Kecamatan Pondokgede

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA/PERUSAHAAN

PADA KECAMATAN PONDOKGEDE

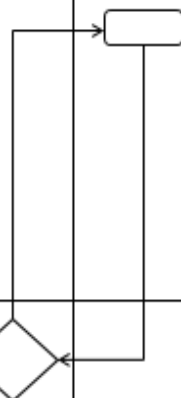
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima Berkas Pengajuan Domisili Usaha b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, Bila berkas yang diajukan tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi kepemohon, apabila berkas tersebut lengkap akan di dibuat/ di Cetak Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan dan pemohon menandatangani Surat Keterangan					1 Pengantar RT/RW 2 Foto copy KTP Pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 Foto copy PBB Tahun Berjalan 5 Ijin tetangga bagi usaha dengan resiko tinggi	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap	
2	Memeriksa Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU yang Sudah dibuat/diCetak berikut Kelengkapannya dan di bubuhkan paraf Kasi Ekbang					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 menit	SKDU terparaf Kasi ekbang	
3	Berkas SKDU yang sudah diparaf kasi ekbang kecamatan diajukan ke Sekretaris Kecamatan untuk dibubuhkan paraf kembali					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 Menit	SKDU terparaf Sekcam	
4	Menerima Berkas Domisili Usaha dan memberi Tanda Tangan					Berkas SKDU paraf Kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	SKDU telah ditanda tangan Camat	
5	Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan akan di Register arsip dan diberikan kembali kepada pemohon					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan yang sudah diketahui / ditanda tangani dan di register	5 Menit	Surat Keterangan Domisili Usaha di terima Pemohon (dilanjutkan untuk pengurusan Perijinan selanjutnya)	

Gambar 6. SOP Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK, DAN SEKOLAH (PA'UD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE**

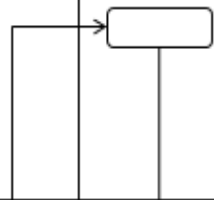
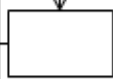
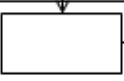
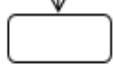
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah engkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut					1 Pengantar RT/RW 2 Fotocopy KTP 3 Surat Akta Pendirian 4 Surat Akta Notaris 5 Ijin Tetangga 6 Surat Kepemilikan/Status 7 Foto Copy Bukti 8 Rekomendasi Dari lembaga Terkait 9 Kelurahan	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap	
2	Menelaah permohonan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah yang telah ditandatangani Lurah setempat jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf	
3	Pemarafan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Dokumen pemohon lengkap	3 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf	
4	Penandatanganan, Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Surat Domisili telah di paraf	3 Menit	Surat Domisili telah ditandatangani	
5	Menerima, meregister, mengarsipkannya Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah dan memberikannya kepada pemohon					Surat Domisili yang telah Disah	4 Menit	Surat Domisili diterima oleh Pemohon untuk dproses lebih lanjut ke Dinas terkait	

Gambar 7. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP dan SMA)

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAME - RAME
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a. Menerima kelengkapan berkas Izin Rame-reme yang telah ditandatangani Lurah Setempat b. Memeriksa Surat izin Rame-Rame, Bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan di proses lanjut					Formulir Permohonan 1 Foto Copy KTP 2 Foto Copy KK 3 Pengantar RT, Rw 4 Surat izin rame -rame dari Kelurahan	30 Menit 10 Menit	Pemohon menyerahkan dokumen Persyaratan Dokumen Permohonan Lengkap	
2	Meneliti dan memaraf Surat Izin Rame - rame , jika tidak sesuai / disetujui dikembalikan ke pelaksana, jika disetujui maka di paraf					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame terparaf	
3	Menerima dan memaraf Surat Izin Rame - rame yang telah di paraf Kasi Trantib					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai terparaf	5 Menit	Surat Izin Rame-rame teparaf	
4	Penandatanganan Izin ramai - ramai yang telah di paraf kasi trantib dan Sekcam					Surat Izin Ramai-ramai diparaf	5 Menit	Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	
5	Menerima, mengarsipkan Surat izin rame-rame yang telah di tanda tangani yang akan di berikan kepada pemohon					Pengantar Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	4 Menit	Pengantar Izin Ramai-ramai yang telah diterima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek	

Gambar 8. SOP Pengantar Izin Rame-Rame

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi Golongan II ke atas belum proporsional.

Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokgede

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	53	4	40	9	
	-Camat	1	1			
	-Sekcam	1		1		
	-Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1	1			
	-Kasi Kesejahteraan Sosial	1		1		
	-Kasi Ekonomi	1	1			
	Pembangunan					
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1			
	-Kasi Pemerintahan	1		1		
	-Kasubag Keuangan	1		1		
	-Kasubag TU	1		1		
	-Lurah	5		5		
	-Sekel	5		5		
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	5		5		
	-Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kelurahan	5		5		
	-Kasi Kesos Kelurahan	5		5		
	-Staf Pelaksana	19		10	9	
2	PPPK	107	-	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	33	-	-	-	-
	TOTAL	193	4	40	9	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.1.3. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun 2025 sebanyak 193 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah pegawai Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	42	11	53
2	PPPK	65	42	107
3	TKK	19	14	33
Jumlah		126	67	193

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

a. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintahan Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Pondokgede terdiri dari eselon IIIa, IIIb, IVa dan IVb. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede yang menduduki jabatan dan staf tahun 2025

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon III	2	0	2
2	Eselon IV	26	6	32
3	Staf	13	6	19
Jumlah		41	12	53

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

b. Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat

Kondisi pada tahun 2025 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede termasuk di dalamnya pegawai kelurahan sebanyak 53 orang PNS yang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 orang atau 15% yang berstatus golongan III sebanyak 40 orang atau 55% pegawai dan golongan II sebanyak 9 orang atau 10% . Pegawai PPPK Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 107 orang atau 30%.

Namun masih ada pegawai yang berstatus TKK yaitu sebanyak 33 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2025

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	3	1	4
2	III	30	10	40
3	II	8	1	9
Jumlah		41	12	53

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

c. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai berstatus PNS di Kecamatan Pondokgede pada tahun 2025, status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebanyak 34 orang, S2 sebanyak 12 orang, D3 sebanyak 1 orang dan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebanyak 6 orang.

Tabel 6. Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan pendidikan tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata-2 (S2)	9	3	12
2	Strata-1(S1)/D4	25	9	34
3	Sarjana Muda/D3	1	0	1
4	SLTA/Sederajat	6	0	6
Jumlah		41	12	53

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

d. Jumlah PPPK & NON ASN berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai berstatus PPPK & NON ASN di Kecamatan Pondokgede pada tahun 2025, status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebanyak 25 orang, S2 sebanyak ,D3 sebanyak 1 orang dan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebanyak 10 orang.

Tabel 7. Jumlah PPPK & NON ASN Kecamatan Pondokgede berdasarkan pendidikan tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata-2 (S2)	2	0	2
2	Strata-1(S1)/D4	41	25	66
3	Sarjana Muda/D3	4	2	6
4	SLTA/Sederajat	37	29	66
Jumlah		84	56	140

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pondokgede

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Pada tahun 2025, dari 53 PNS Kecamatan Pondokgede tidak terdapat pegawai pns yang mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, dan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebanyak 7 orang.

2.1.4. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pondokgede tergolong cukup baik, namun ada beberapa sarana penting yang mengalami rusak berat seperti komputer dan printer sehingga menghambat pekerjaan dan berdampak kepada pelayanan masyarakat serta pekerjaan penunjang lainnya.

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 8. Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Pondokgede

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Gedung dan bangunan	Unit	74	-	1	75
2	Kendaraan Roda 4	Buah	12	-	-	12
3	Kendaraan Roda 2	Buah	30	1	-	31
4	Komputer	Unit	23	-	3	26
5	Printer	Unit	15	-	1	16
6	Mesin Ketik	Unit	2	-	-	2
7	Infocus	Unit	5	-	1	6
8	Air Conditioner	Unit	20	-	2	22
9	Lemari	Buah	33	2	-	35
10	Meja	Buah	40	-	7	47
11	Kursi	Buah	100	-	50	150
12	LCD	Buah	1	-	-	1
13	Laptop	Unit	1	-	3	4

Sumber : Data Aset Kecamatan Pondokgede

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis. Tingkat Pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pondokgede berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PERM/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007, pada Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKIP Kecamatan Pondokgede.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Pondokgede tahun 2025 - 2029 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimana terdapat indikator-indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Pondokgede. Berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, semua target Indikator telah mencapai target. Hal ini karena peran *stakeholder* pendukung indikator yang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, capaian indikator ini bisa saja tidak tercapai di Renstra periode 2025-2029 karena indikator ini bersifat pelayanan dasar dimana keadaan tiap tahun berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami.

Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2025-2029 adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami prosedur pelayanan;
2. Kurangnya alokasi kegiatan rutin sinergitas antara pihak aparatur Kecamatan Pondokgede dengan masyarakat sehingga informasi Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Pondokgede terhadap *stakeholder* terkait sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Pondokgede dengan UPTD/UPTB di lingkungan Kecamatan Pondokgede dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada;
4. Terjadinya bencana alam atau pandemi yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pondokgede.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara *offline* atau *online* dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diklat kepada petugas *front office* dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;
2. Akan dilakukan alokasi anggaran untuk rapat-rapat sinergitas 3 unsur dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokgede serta kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokgede sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
3. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
4. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menanggulangi atau mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam ataupun pandemi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.3.1. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 8.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede diukur berdasarkan tingkat pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian Tujuan dan Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 terdapat 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis harus di capai oleh Kecamatan Pondokgede dalam tiap tahunnya.

Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede periode 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan di sesuaikan dengan Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023**

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir Renstra	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan Kecamatan Pondokgede	%	60	60	60	-	-	-	66.67	66.67	-	-	-	1.11	1.11	-	-	-	TERCAPAI
2	Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Nilai	72	-	-	71	71.5	72	-	-	75.21	75.43	75.52	-	-	1.06	1.05	1.04	TERCAPAI
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	81	81.5	82	82.5	83	81.21	78.13	83.68	84.89	-	1.00	0.96	1.02	1.03	-	TERCAPAI
4	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Pondokgede	%	65	-	-	60	62	65	-	-	61.54	62	65	-	-	1.03	1.00	1.00	TERCAPAI
5	Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Pondokgede	%	86	43	50	57	71	86	43	50	57	73.68	92.30	1.00	1.00	1.00	1.04	1.07	TERCAPAI

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir Renstra	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio			Ket
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Capaian Zona Integritas (ZI)	Nilai	31	25	28	31	66.06	-	-	2.64	-	-	TERCAPAI
2	Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Nilai	76	75.5	75.7	76	77.14	-	-	1.04	-	-	TERCAPAI
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85.5	85	85.3	85.5	85.53	-	-	1.06	-	-	TERCAPAI
4	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	%	77	31	54	77	33.33	-	-	1.07	-	-	TERCAPAI

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dari tabel diatas, Indikastor Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede tahun 2024 capaian target sebesar 77.14 dari target 75.5 sehingga persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi di bagi target di kali 100%, yakni $77.14/75.5 \times 100\% = 102.17 \%$ berdasarkan hasil evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LHE SAKIP) yang di lakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Nomor: 700.1.2.1/070-LHE/ITKO.Set tanggal 4 Juli 2024. Pada tahun 2024 Kecamatan Pondokgede harus bisa mempertahankan kinerja yang baik terhadap indikator kinerja pada tahun 2024 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pondokgede yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2024 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah data tersebut memperoleh hasil IKM sebesar Indeks 85.53 sedangkan target IKM Renstra 2024 - 2026 Kecamatan Pondokgede pada tahun 2024 yaitu Indeks 85 dengan perhitungan capaian kinerja realisasi dibagi target dikali 100% ($85.53/85 \times 100\% = 100.62\%$) maka capaian 100.62% dan telah melampaui target Renstra.

Pada Indikator Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Pondokgede yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023 dimana masyarakat mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pondokgede. setelah diolah data tersebut memperoleh hasil capaian Pemberdayaan masyarakat sebesar 65 persen sedangkan target pemberdayaan masyarakat pada Renstra 2018 - 2023 Kecamatan Pondokgede perubahan pada tahun 2023 yaitu 65 persen dengan perhitungan capaian kinerja realisasi

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dibagi target dikali 100% ($65/65 \times 100\% = 100\%$) maka capaian 100% dan telah melampaui target Renstra perubahan. Indikator ini pada tahun 2024 sudah tiada lagi di karenakan adanya perubahan di dalam dokumen RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Pada Indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede dengan koordinasi dan sinergitas 3 Pilar (Koramil,Polsek,Kecamatan) telah melaksanakan kegiatan K3 bersama di wilayah kecamatan Pondokgede. Indikator Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede (Renstra 2024-2026) ditargetkan sebesar 31% sedangkan realisasi sebesar 33,33 dengan capaian kinerja sebesar 107.32% telah melampaui target Renstra 2024-2026. Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun pertama periode RPJMD 2018-2023 namun pada tahun 2024 periode RPD Tahun 2024-2026 terdapat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat penambahan Sub Kegiatan pada Masing- masing Kegiatan juga perubahan Target Indikator Sub Kegiatan mengikuti regulasi yang ada.

Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya secara penuh Rata-rata pertumbuhan pada masing Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan pada Periode Tahun RPJMD 2018-2023 s/d RPD 2024-2026.

Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3,4 dan 5 dantabel 3,4 dan 5 sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2019-2020

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			-		-			
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokgede	170.000.000	-	-	-	-		-	-
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokgede	87.500.000	-	-	-	-		-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan								
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	-		-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	-		-	-
Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	-		-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000	378.000.000	142.527.507	150.169.454	0,56	0,39	0,33	0,05
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.000.000	350.000.000	100.000.000	218.091.500	1,00	0,62	0,71	1,18
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	200.000.000	92.362.500	157.289.500	0,92	0,78	0,50	0,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	200.000.000	81.546.000	152.789.700	0,81	0,76	0,50	0,87

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	1.951.000	-	0,09	-	-	-
nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.690.000	75.000.000	9.500.000	20.240.000	0,38	0,27	0,67	1,13
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	50.000.000	6.807.000		0,17	-	0,20	(1,00)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000	20.000.000	-		0,00	-	-1,50	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	5.711.500.000	5.968.650.000	5.640.138.790	5.835.676.490	0,98	0,97	0,04	0,03
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000	36.660.000	40.340.000	27.320.000	0,80	0,74	-0,36	(0,32)
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100.000.000	-	31.000.000	-	0,31	-	-	-
Penataan Arsip		-		-		-	-	-
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	300.000.000	124.024.285	-	62,01	-	0,33	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000	145.000.000	20.453.900	17.269.300	10,23	0,11	-0,38	(0,16)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede	30.000.000	-	5.632.000	-	0,18	-	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede	89.488.750	120.000.000	89.488.750	95.935.000	1,00	0,79	0,25	0,07
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede	293.000.000	235.000.000	54.185.000	-	0,18	-	-0,25	-
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede	49.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede	196.000.000	1.296.000	30.520.000	761.400	0,15	0,58	-150,23	(0,98)
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwaringin	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jaticepaka	-		-		0,00	-	-	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Program P3BKdi Kelurahan Jatibening Baru	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan Program P3BKdi Kelurahan Jatibening	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan Program P3BKdi Kelurahan Jatimakmur	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokgede	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiwaringin	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jaticempaka	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening Baru	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimakmur	-		-		0,00		-	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatiwaringin	65.400.000	-	65.000.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatiwaringin	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatiwaringin	682.400.000	44.193.600	682.000.000	25.963.740	0,99	0,58	-14,44	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatiwaringin	850.200.000	83.721.600	843.750.000	29.801.412	0,99	0,35	-9,16	(0,96)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatiwaringin	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	100,00	100,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatibening	60.400.000	-	57.500.000	-	0,95	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatibening	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatibening	418.400.000	27.086.400	418.000.000	15.913.260	0,99	0,58	-14,45	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatibening	835.200.000	49.766.400	816.250.000	29.237.760	0,97	0,58	-15,78	(0,96)

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatibening	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatimakmur	80.400.000	-	80.000.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatimakmur	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatimakmur	722.400.000	46.656.000	719.200.000	27.105.623	0,99	0,58	-14,48	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatimakmur	1.200.200.000	70.761.600	1.193.750.000	38.255.003	0,99	0,54	-15,96	(0,97)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatimakmur	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatibening Baru	60.400.000	-	60.000.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatibening Baru	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penguatan Kapasitas KaderPosyandu dan PKK di Kelurahan Jatibening Baru	442.400.000	28.641.600	442.000.000	16.697.340	0,99	0,58	-14,45	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatibening Baru	571.450.000	33.825.600	571.450.000	15.671.340	0,99	0,46	-15,89	(0,97)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatibening Baru	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jaticempaka	682.400.000	44.193.600	682.000.000	25.963.740	0,99	0,58	-14,44	(0,96)
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di KelurahanJaticempaka	82.900.000	-	82.500.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jaticempaka	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jaticempaka	820.200.000	48.988.800	820.000.000	29.034.528	0,99	0,59	-15,74	(0,96)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jaticempaka	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Pondokgede tahun 2019-2020

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2021-2022

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.672.590.500	9.934.237.368	17.708.417.787	19.385.069.081	0,87	0,77	0,01	(0,06)
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	15.000.000	6.517.000	1,00	0,65	(0,18)	0,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	10.000.000	15.000.000	6.517.000	1,00	0,65	(0,18)	0,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.103.435.000	0.199.648.000	10.292.825.699	10.579.657.761	0,96	1,02	(0,04)	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.088.435.000	0.189.648.000	10.277.825.699	10.569.657.761	0,93	1,04	(0,04)	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	1,00	1,00	(0,18)	0,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.162.500	10.000.000	137.287.500	10.000.000	0,99	1,00	(0,73)	2,71
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.162.500	-	137.287.500	-	0,99	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	10.000.000	-	10.000.000	-	1,00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.027.000	465.000.000	572.360.050	393.750.050	0,84	0,74	(0,18)	0,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.027.000	40.000.000	19.505.000	29.998.400	0,97	0,75	0,41	(0,30)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	-	95.700.000	-	0,96	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.210.000	245.000.000	211.182.550	215.012.050	0,88	0,88	0,01	(0,07)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	100.000.000	168.372.500	96.754.600	0,84	0,97	(0,29)	0,30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	20.000.000	30.800.000	15.420.000	0,41	0,77	(0,48)	0,24
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000.000	-	3.925.000	-	0,39	-	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.320.000	30.000.000	16.320.000	14.440.000	1,00	0,48	0,36	(0,26)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.470.000	20.000.000	30.480.000	18.200.000	0,84	0,91	(0,26)	0,23
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	100.000.000	-	54.581.500	-	0,55	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100.000.000	-	54.581.500	-	0,55	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.389.326.000	8.673.779.368	6.393.349.538	7.974.990.879	0,63	0,68	0,08	(0,14)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.610.000	422.000.000	147.194.263	178.986.429	0,36	0,42	0,02	(0,41)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.979.716.000	8.251.779.368	6.246.155.275	7.796.004.450	0,89	0,94	0,09	(0,13)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.640.000	475.810.000	297.595.000	365.571.891	0,82	0,77	0,19	(0,21)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.800.000	50.074.000	63.854.000	45.123.300	0,70	0,90	(0,26)	0,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak. Dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	150.736.000	-	62.618.600	-	0,42	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000	75.000.000	39.184.000	59.163.000	0,77	0,79	0,21	(0,28)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.800.000	200.000.000	194.557.000	198.666.991	0,99	0,99	0,01	(0,01)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	157.500.000	180.000.000	136.210.900	141.586.648	0,86	0,99	0,07	(0,13)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	157.500.000	120.000.000	136.210.900	118.590.000	0,86	0,99	(0,13)	0,07
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	25.000.000	20.000.000	23.630.000	20.000.000	0,95	1,00	(0,11)	0,09

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Pondokgede)								
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	30.000.000	20.000.000	28.005.000	19.555.000	0,93	0,98	(0,18)	0,18
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	25.000.000	20.000.000	17.751.300	19.130.000	0,71	0,96	(0,11)	(0,06)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	25.000.000	20.000.000	23.411.300	19.950.000	0,94	1,00	(0,11)	0,08
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	27.500.000	20.000.000	25.662.000	19.955.000	0,93	1,00	(0,15)	0,13
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening Baru)	25.000.000	20.000.000	17.751.300	20.000.000	0,71	1,00	(0,11)	(0,06)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	60.000.000	-	22.996.648	-	0,38	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	-	60.000.000	-	22.996.648	-	0,38	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.887.784.800	6.132.532.400	4.807.811.248	5.675.933.251	0,75	0,82	0,02	(0,11)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.887.784.800	6.032.532.400	4.807.811.248	5.600.573.251	0,75	0,89	0,01	(0,11)

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	11.750.000	120.000.000	11.750.000	98.842.000	1,00	0,82	2,20	(0,69)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pondokgede)	306.296.000	335.836.000	132.060.700	306.750.200	0,43	0,91	0,05	(0,37)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiwaringin	1.108.637.600	1.109.837.600	939.944.149	1.042.079.598	0,85	0,94	0,00	(0,08)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimakmur	1.475.059.600	1.476.239.200	1.264.448.399	1.378.519.600	0,86	0,93	0,00	(0,07)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening	1.013.704.000	1.015.304.000	868.781.200	953.840.779	0,86	0,94	0,00	(0,07)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jaticempaka	1.130.378.400	793.371.200	930.904.600	734.583.274	0,82	0,93	(0,16)	0,08
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening Baru	791.959.200	1.131.944.400	641.767.200	1.052.152.800	0,81	0,93	0,20	(0,25)
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	50.000.000	18.155.000	33.805.000	0,36	0,68	0,00	(0,40)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	100.000.000	-	75.360.000	-	0,75	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwaringin)	-	20.000.000	-	17.900.000	-	0,90	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimakmur)	-	20.000.000	-	13.500.000	-	0,68	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening)	-	20.000.000	-	20.000.000	-	1,00	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jaticempaka)	-	20.000.000	-	10.460.000	-	0,52	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening Baru)	-	20.000.000	-	13.500.000	-	0,68	-	-
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	64.500.000	-	59.390.000	-	0,92	-	-

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	64.500.000	-	59.390.000	-	0,92	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	64.500.000	-	59.390.000	-	0,92	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50.000.000	-	45.860.000	-	0,92	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	-	50.000.000	-	45.860.000	-	0,92	-	-
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	50.000.000	-	45.860.000	-	0,92	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Pondokgede tahun 2021-2022

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2023-2024

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.768.640.588	21.017.770.480	18.496.347.655	20.098.475.873	0.89	0.95		
Perencanaan Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	15.800.000	2.869.000	8.520.000	0.95	0.53		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	15.800.000	2.869.000	8.520.000	0.95	0.53		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.846.321.000	11.473.215.000	10.022.287.126	11.152.476.838	0.84	0.97		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.843.321.000	11.457.414.000	10.019.470.126	11.140.575.838	0.84	0.97		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	15.801.000	2.817.000	11.901.000	0.93	0.75		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	45.000.000	10.000.000	45.000.000	100	100		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	45.000.000	10.000.000	45.000.000	100	100		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.000.000	567.958.000	414.132.197	477.290.810	0.84	0.84		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	18.320.328	19.307.500	0.91	0.96		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	245.000.000	287.102.000	211.737.000	259.414.500	0.86	0.90		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000	75.000.000	68.982.900	54.059.000	0.91	0.72		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	25.000.000	19.275.000	23.560.000	0.96	0.94		
Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	12.000.000	4.535.000	6.720.000	0.45	0.56		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	115.000.000	128.856.000	86.366.969	97.417.810	0.75	0.75		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	20.000.000	4.915.000	16.812.000	0.98	0.84		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasidan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024			Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	420.101.000	0	328.527.000	0	0.78		
Pengadaan Mebel	0	20.000.000	0	17.677.000	0	0.88		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	400.101.000	0	310.850.000	0	0.77		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.063.583.588	7.957.696.480	7.790.757.568	7.691.439.860	0.96	0.96		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.000.000	456.024.800	238.725.499	335.932.554	0.56	0.73		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.641.975.720	7.501.671.680	7.552.032.069	7.355.507.306	0.98	0.98		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.736.000	538.000.000	256.301.764	395.221.365	0.72	0.73		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	35.000.000	113.000.000	34.535.500	79.036.350	0.98	0.69		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau Lapangan	150.736.000	165.000.000	68.902.809	96.086.800	0.45	0.58		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	60.000.000	9.840.000	23.400.000	0.49	0.39		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	200.000.000	143.023.455	196.700.215	0.95	0.98		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	180.00.000	240.000.000	170.554.000	221.699.250	0.94	0.92		
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	130.000.000	210.000.000	126.765.000	192.445.250	0.97	0.91		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	30.000.000	60.000.000	29.245.000	56.962.250	0.97	0.94		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	20.000.000	30.000.000	19.520.000	26.350.000	0.97	0.87		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	20.000.000	30.000.000	19.520.000	25.667.000	0.97	0.85		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	20.000.000	30.000.000	19.440.000	28.662.000	0.97	0.95		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	20.000.000	30.000.000	19.520.000	26.350.000	0.97	0.87		
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening Baru)	20.000.000	30.000.000	19.520.000	28.454.000	0.97	0.94		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000	30.000.000	43.989.000	29.254.000	0.87	0.97		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	50.000.000	30.000.000	43.989.000	29.254.000	0.87	0.97		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.774.895.000	9.440.711.800	7.617.374.033	9.337.969.200	0.97	0.98		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.344.895.000	9.160.711.800	7.210.208.033	9.062.029.200	0.98	0.98		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	120.000.000	120.000.000	109.764.250	111.549.500	0.91	0.92		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	187.441.000	152.296.000	172.784.199	140.558.400	0.92	0.92		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	1.209.437.600	1.606.387.000	1.205.114.598	1.583.439.000	0.99	0.98		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	1.615.396.800	2.026.685.600	1.544.008.998	1.989.264.000	0.95	0.98		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	1.124.504.000	1.444.677.000	1.121.908.798	1.443.163.400	0.99	0.99		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	1.184.744.400	1.581.114.400	1.170.807.394	1.568.588.400	0.98	0.99		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	853.371.200	1.179.551.200	849.644.796	1.178.079.00	0.99	0.99		
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	50.000.000	36.175.000	47.387.500	0.72	0.94		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	430.000.000	280.000.000	407.166.000	275.940.000	0.94	0.98		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwaringin)	70.000.000	40.000.000	62.600.000	40.000.000	0.89	100		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimakmur)	70.000.000	40.000.000	64.850.000	40.000.000	0.92	100		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening)	70.000.000	40.000.000	69.800.000	40.000.000	0.99	100		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jaticempaka)	70.000.000	40.000.000	63.500.000	40.000.000	0.90	100		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening Baru)	70.000.000	40.000.000	68.900.000	40.000.000	0.98	100		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	80.000.000	80.000.000	77.516.000	75.940.000	0.96	0.94		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.332.845.400	1.328.625.000	1.190.874.200	1.288.206.000	0.89	0.96		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.332.845.400	1.328.625.000	1.190.874.200	1.288.206.000	0.89	0.96		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	172.000.000	48.542.500	160.386.000	0.97	0.93		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	446.845.400	320.625.000	314.331.700	293.820.000	0.70	0.91		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiwaringin)	156.400.000	156.400.000	150.000.000	156.000.000	0.95	0.99		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatimakmur)	192.400.000	192.400.000	192.000.000	192.000.000	0.99	0.99		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening)	144.400.000	144.400.000	144.000.000	144.000.000	0.99	0.99		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jaticempaka)	198.400.000	198.400.000	198.000.000	198.000.000	0.99	0.98		
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening Baru)	144.400.400	144.400.400	144.000.000	144.000.000	0.99	0.99		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	40.000.000	45.860.000	36.632.500	0.91	0.96		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	40.000.000	45.860.000	36.632.500	0.91	0.96		
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	40.000.000	45.860.000	36.632.500	0.91	0.96		

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Pondokgede tahun 2023-2024

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan publik pada Kecamatan Pondokgede merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, kecamatan sebagai salah satu unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan kepada warga. Kecamatan Pondokgede, yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat, memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bekasi.

Namun, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, urbanisasi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan, Kecamatan Pondokgede dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta adaptasi terhadap teknologi informasi menjadi isu krusial yang harus segera ditangani.

Di sisi lain, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah ini. Kehadiran inovasi digital, kebijakan reformasi birokrasi, dan keterlibatan aktif masyarakat memberikan ruang yang besar untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan publik di Kecamatan Pondokgede. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi penguatan pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kecamatan Pondokgede.

Sinergitas antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bekasi 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 akan mengakibatkan tercapainya visi misi, tujuan dan terlaksananya sasaran yang menjadi prioritas baik bagi Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan Pondokgede.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Pondokgede ke depan antara lain :

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti;
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Pondokgede;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Pondokgede;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dengan memperhatikan Tantangan dan Peluang yang sudah dituangkan pada point diatas, Kecamatan Pondokgede melakukan analisa terhadap factor Internal dan Eksternal, antara lain :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Faktor Internal

Kekuatan

- a. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman;
- b. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi;
- c. Adanya SOP sesuai ketugasan;
- d. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi;
- e. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- f. Lingkungan kerja yang kondusif;
- g. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif;
- h. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan;
- i. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- a. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Pondokgede dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang;
- b. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan;
- c. Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif;
- e. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Faktor Eksternal

Peluang

- a. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi;
- b. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi/ kelembagaan di wilayah;
- c. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/ wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat;
- d. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif ;
- e. Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll;
- f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik;
- g. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

- a. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi;
- b. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
- b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
- c. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
- d. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
- g. Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antar Pemerintah.

Renstra Kecamatan Pondokgede juga merujuk pada Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama (Biro Pemksm) Jawa Barat. Visi Biro Pemksm Jawa Barat adalah “ Fasilitator yang handal dan dapat mewujudkan pemerintahan dan kerja sama daerah Provinsi Jawa Barat. Biro Pemksm yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Pondokgede adalah :

1. Meningkatkan Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Wali Kota Bekasi yang selanjutnya diterapkan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RT dan RW tersebut memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Pondokgede termaksud dalam kawasan pengembangan kawasan hunian, perdagangan dan jasa serta industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106.9258° atau 106° 55' 33 " Bujur Timur dan -6.27° 6' 16" 12 atau Lintang Selatan kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 22°C s.d 32°C kelembapan yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.

Kecamatan Pondokgede mempunyai luas wilayah 1.592,246 Ha, dengan jumlah penduduk 238.708 Jiwa (s.d Desember 2017) terdiri dari Laki-laki sebanyak 121.113 Jiwa dan Perempuan sebanyak 117.595 Jiwa. Kecamatan Pondokgede terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Kelurahan Jatiwaringin;
2. Kelurahan Jaticempaka;
3. Kelurahan Jatimakmur;
4. Kelurahan Jatibening;
5. Kelurahan Jatibening Baru.

Batas-batas Wilayah Kecamatan Pondokgede adalah sebagai berikut:

SEBELAH TIMUR	: Kec. Jatiasih dan Kec. Bekasi Selatan kota Bekasi
SEBELAH BARAT	: Kelurahan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur
SEBELAH UTARA	: Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur
SEBELAH SELATAN	: Kec. Pondokmelati Kota Bekasi

Pada letak orbitasi (jarak) Kecamatan Pondokgede dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut : Jarak dengan Pusat Pemerintah Kota Bekasi = 12 KM, Jarak dengan Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat = 165 KM dan Jarak dengan Pusat Ibukota RI Jakarta = 35 KM.

Sebagai Kawasan Kegiatan Wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan Penyelenggaraan Penataan ruang antara lain :

1. Ruang Wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana tata ruang disusun dengan Perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tola dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala. Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Pondokgede termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri primer yaitu Jl. Jatiwaringin serta jalan arteri sekunder poros utara yaitu jaringan lintas tengah lain antara Jl. Jatimakmur dan Jl. Caman Jatibening.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Perwujudan Pola Ruang Budi daya dalam rencana kawasan peruntukan kawasan perumahan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, pengembangan perumahan vertikal, tata dan peningkatan kawasan kumuh serta adanya rencana kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan di Kecamatan Pondokgede yaitu wilayah Atrium Pondokgede.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Rencana kawasan peruntukan kawasan pariwisata dalam pengembangan PKPW Utara (zona kawasan budaya dan olahraga) untuk pengembangan Sub PKPW-2 (sport- culture touris park) adanya rencana kawasan peruntukan kawasan lainnya (sarana pelayanan umum) yang di rencanakan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Pondokgede RSUD Tipe C Pondokgede, pembangunan puskesmas Jatiwaringin serta pembangunan SMP di wilayah Kelurahan Jatibening. Guna memperbaiki wilayah maka ada penanganan kawasan strategis Kota dalam Penataan Kawasan di wilayah Kecamatan Pondokgede.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja pasal 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.4.2. Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum, kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Pondokgede mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah kecamatan tersebut. Namun, dalam implementasi kebijakan dan program, seringkali terdapat fokus yang lebih spesifik pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap lebih rentan, membutuhkan perhatian khusus, atau menjadi prioritas pembangunan. Berikut adalah rincian kelompok sasaran pelayanan di Kecamatan Pondokgede:

1. Berdasarkan Usia:

- Anak-anak (0-17 tahun): Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pelayanan pendidikan (PAUD, SD, SMP), kesehatan (imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin), perlindungan anak (pencegahan kekerasan, penelantaran), dan pengembangan potensi (kegiatan ekstrakurikuler, ruang bermain publik).
- Remaja (18-25 tahun): Pelayanan untuk remaja meliputi pendidikan lanjutan (SMA/SMK), pengembangan keterampilan (pelatihan vokasi), kesehatan reproduksi, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pemberdayaan pemuda.
- Dewasa (26-59 tahun): Kelompok usia produktif ini menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan, pengobatan), ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja, pelatihan), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelayanan administrasi kependudukan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Pelayanan untuk lansia meliputi kesehatan (posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan), jaminan sosial, kegiatan sosial dan rekreasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi:

- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): Kelompok ini menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial (PKH, BPNT), pelayanan kesehatan gratis atau subsidi, bantuan pendidikan (KIP), serta program pemberdayaan ekonomi.
- Penyandang Disabilitas: Pelayanan bagi penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan alat bantu, serta dukungan sosial.
- Keluarga Rentan: Keluarga dengan risiko sosial tinggi (miskin, kepala keluarga perempuan, memiliki anak berkebutuhan khusus) menjadi sasaran program penguatan keluarga dan bantuan sosial.
- Korban Kekerasan dan Diskriminasi: Kelompok ini membutuhkan pelayanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

3. Berdasarkan Kondisi Geografis dan Lingkungan:

- Warga di Wilayah Rawan Bencana: Pelayanan meliputi sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta bantuan pasca-bencana.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Warga di Lingkungan dengan Kualitas Hidup Rendah: Pelayanan fokus pada perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

4. Kelompok Khusus Lainnya:

- Ibu Hamil dan Menyusui: Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca melahirkan, serta dukungan laktasi.
- Penderita Penyakit Tertentu: Pelayanan kesehatan khusus sesuai dengan jenis penyakit (misalnya, program TB, HIV/AIDS, penyakit tidak menular).
- Komunitas Tertentu: Pemerintah kecamatan dapat memiliki program khusus untuk komunitas tertentu berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah (misalnya, kelompok tani, kelompok pengrajin).

Kecamatan Pondokgede memiliki peran penting dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Kota Bekasi di tingkat wilayah. Camat dan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk puskesmas, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan pelayanan yang tepat sasaran dan efektif. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal. Beberapa tantangan meliputi:

- a. Pendataan yang Akurat dan Terintegrasi: Memastikan data kelompok sasaran yang valid dan terkini.
- b. Sosialisasi Program yang Efektif: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai program pelayanan yang tersedia.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- c. Aksesibilitas Pelayanan: Memastikan kemudahan akses fisik dan non-fisik terhadap layanan bagi seluruh kelompok sasaran.
- d. Koordinasi Antar Sektor: Memperkuat sinergi antara berbagai perangkat daerah dan pihak terkait dalam memberikan pelayanan.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area perbaikan. Kecamatan Pondokgede terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai inovasi, penguatan kapasitas sumber daya, dan peningkatan koordinasi.

2.4.3. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedangkan rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Permasalahan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Pondokgede adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama sebagai Pelayanan Masyarakat. Selain itu Rencana Strategis inipun mengacu pada RPJMD Kota Bekasi yang dibuat oleh Kota Bekasi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

RPJMD Kota Bekasi yang memuat informasi tentang Sumber daya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah (PD), lintas Perangkat Daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPjMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang dibuat oleh Kota Bekasi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Pondokgede diuraikan ke dalam 3 Kelompok masalah yaitu Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Adapun Uraian 3 Kelompok Masalah tersebut dapat di lihat pada Tabel 14.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 14. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondokgede

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastuktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastuktur yang memadai terkait kemacetan, banjir, jalan rusak , drainase saluran air kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta admnistrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase saluran air di wilayah Kecamatan Pondokgede
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
			Kurangnya motivasi dan jiwa enterpreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
3	Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana pemerintahan yang menghambat pemenuhan layanan prima bagi masyarakat	Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat	Keterbatasan pelaksanaan teknis terhadap layanan
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam proses pelayanan kepada masyarakat
		Dukungan Manajemen yang belum optimal	Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/ di berikan
			Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasi sesuai dengan analisa jabatan
			Kurangnya pembinaan, pelatihan dan Diklat untuk meningkatkan Kompetensi SDM

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Pondokgede tahun 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.4.5 Telaahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah,terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis yang sangat penting. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ke dalam bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Telaahan terhadap RPJMD ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perencanaan telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada data serta kondisi riil daerah. Melalui telaahan ini,diharapkan dapat diidentifikasi berbagai isu strategis, potensi unggulan,serta tantangan yang dihadapi Kota Bekasi, guna menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Telaahan ini juga memuat analisis terhadap capaian pembangunan sebelumnya, konsistensi dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian, dokumen telaahan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kualitas dan integritas RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kondisi umum daerah dan RPJMD Kota Bekasi, permasalahan pelayanan umum di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Pondokgede, antara lain:

- a.Kualitas RB di Kecamatan Pondokgede pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kota Bekasi dengan RB Jawa Barat dan RB Nasional dan peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara PD;
- b.Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede menunjukkan tren peningkatan tiap tahun, akan tetapi realisasi masih dibawah target;
- c.Perlunya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Pondokgede mengingat nilai SAKIP Kecamatan Pondokgede berada pada angka 77,14 di tahun 2024; dan

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- d. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede yang pada Tahun 2024 berada pada indeks 85,53 memiliki mutu pelayanan “Baik” akan tetapi belum mencapai target.

2.4.6 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2.4.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pondokgede

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PONDOKGEDE

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan akuntabel, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan lima tahunan secara sistematis dan terukur. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas yang dilaksanakan di Kecamatan Pondokgede sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, Kecamatan Pondokgede menghadapi berbagai tantangan yang menuntut adanya identifikasi dan perumusan isu-isu strategis secara tepat. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak luas dan berjangka panjang terhadap capaian pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan isu-isu strategis ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam konteks Kecamatan Pondokgede, beberapa faktor yang melatar belakangi pentingnya identifikasi isu strategis antara lain adalah: pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, kompleksitas kebutuhan layanan publik, perubahan pola hidup masyarakat urban, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, tuntutan terhadap transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik semakin menguat, seiring meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pembahasan isu strategis ini, Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 diarahkan agar mampu memberikan solusi konkret dan terukur terhadap permasalahan yang bersifat krusial, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima, pembangunan wilayah yang berkeadilan, dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Isu strategis yang dirumuskan tidak hanya mengacu pada evaluasi capaian program sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal dan internal, serta Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Pondokgede yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan Pondokgede sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Pondokgede berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat Pondokgede. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Pondokgede kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kecamatan Pondokgede dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis.

Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bekasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 4 tahun 2014 Seri E Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bekasi No. 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang Perdagangan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan. Sehingga perlu adanya Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pondokgede, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Pondokgede, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Pondokgede yang terdiri dari lima kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi. Secara teknis, pembangunan kewilayahan merupakan sebagian wewenang dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam hal ini Kecamatan Pondokgede memfasilitasi dan meneruskan permasalahan pembangunan serta infrastruktur yang ada di Kecamatan Pondokgede kepada Dinas terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembangunan kewilayahan di Kecamatan Pondokgede seperti wilayah Pondokgede yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta sehingga mobilitas masyarakat yang tinggi menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Jalan yang menjadi perhatian khusus adalah Jl. Raya Jatiwaringin dimana masih terdapat titik-titik kemacetan seperti Simpang Gamprit, Simpang Setia, simpang Radar serta lingkaran APG. Selain itu di Jl. Raya Caman terutama di simpang lima Jatibening. Pembangunan jembatan yang sudah dilakukan menurunkan kemacetan yang ada, namun masih terdapat kemacetan di simpang lima mengingat terdapat pembangunan stasiun Lintas Rel Terpadu (LRT) di tempat tersebut. Jl. Raya Jatimakmur juga masih terdapat kemacetan seperti di simpang bojong mengingat lebar jalan yang masih sempit.

Selain kemacetan, pembangunan kewilayahan juga akan dilakukan terhadap Terminal Pondokgede karena kondisi saat ini kondisi terminal yang sangat memprihatinkan.

Terminal Pondokgede terdapat pada perbatasan dengan Kecamatan Pondokmelati. Masalah banjir juga masih menjadi isu yang hangat di Kecamatan Pondokgede. Selain itu, kehadiran Pedagang Kaki Lima juga masih menjadi permasalahan kewilayahan mengingat Kecamatan Pondokgede merupakan salah satu wilayah Perniagaan di Kota Bekasi.

Adapun Penataan dan pemanfaatan Ruang terbuka pada lahan Fasos/Fasum yang dapat difungsikan sebagai sarana hiburan, Centra Ekonomi dan ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup serta mendorong masyarakat dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat juga menciptakan budaya baru yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan.

Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Pondokgede. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Isu-Isu Strategis di Kecamatan Pondokgede diakomodir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede setiap tahunnya. Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan diakomodir dalam kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat diakomodir melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan, Kegiatan LPM, Kegiatan RT dan RW, Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK, Kegiatan Peningkatan Ketertiban serta Kegiatan Peningkatan Kenyamanan Lingkungan. Keterbukaan Informasi Publik diakomodir melalui Kegiatan Perijinan dan Non perijinan untuk menyebarluaskan informasi kepada warga.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PONDOKGEDE

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Daerah. OPD Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah berkewajiban menjabarkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. RPJMN 2025-2030 mengusung Visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Telaahan terhadap tujuan dan sasaran nasional yang relevan untuk Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 9. Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan

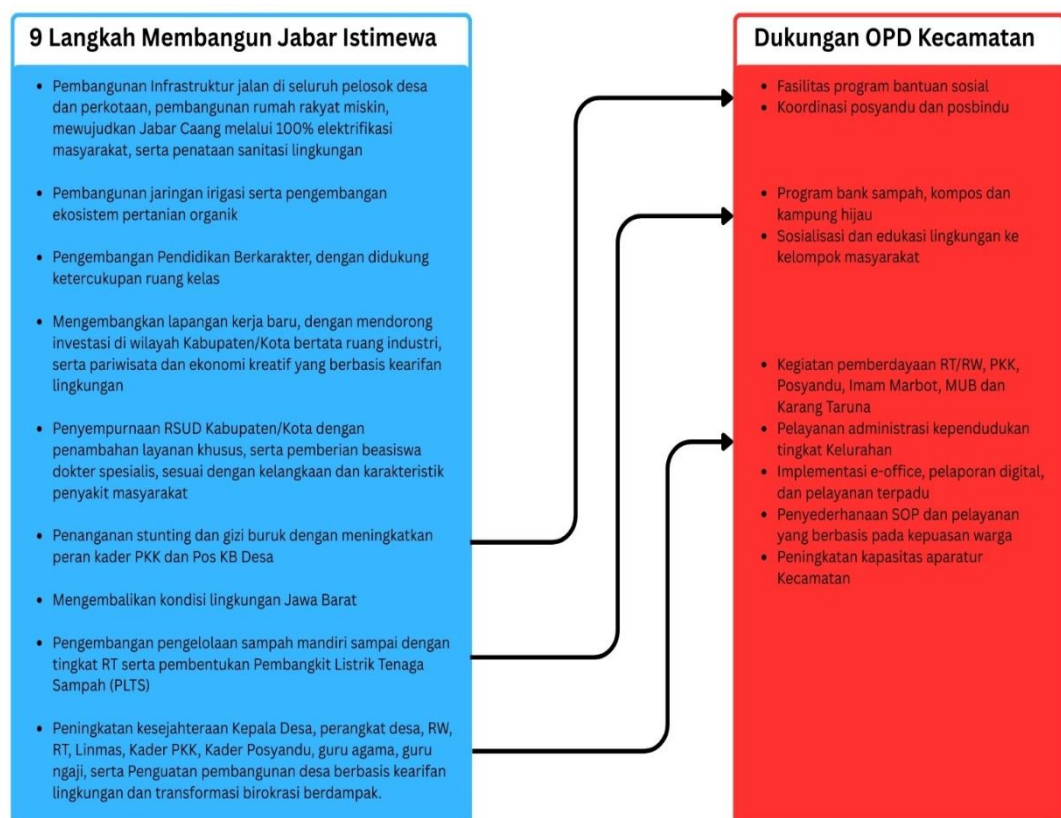
Fokus Utama RPJMN 2025-2030	Relevansi Untuk Kecamatan	Dukungan OPD Kecamatan
Transisi Energi dan Lingkungan	• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. • Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal.	• Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau. • Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat.
Transformasi sosial	• Penurunan angka kemiskinan ekstrem. • Akses pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. • Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga.	• Fasilitasi program bantuan sosial. • Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan. • Koordinasi posyandu dan posbindu. • Kegiatan pemberdayaan RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.
Transformasi Ekonomi	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan. • Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro.	• Pembinaan UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan. • Promosi produk lokal dan pasar murah. • Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha.
Transformasi Tata Kelola	• Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan. • Digitalisasi layanan publik.	• Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu. • Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga. • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.
Pembangunan Wilayah	• Penanggulangan daerah kumuh. • Infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan). • Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana.	• Pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, dan kawasan kumuh. • Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya. • Fasilitasi musrenbang kelurahan berbasis spasial dan kebutuhan nyata.

Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai landasan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, RPJMD ini mencakup 25 Program Prioritas yang didukung 9 Langkah Strategis untuk menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencapaian Jabar Istimewa ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. Kontribusi Kecamatan terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

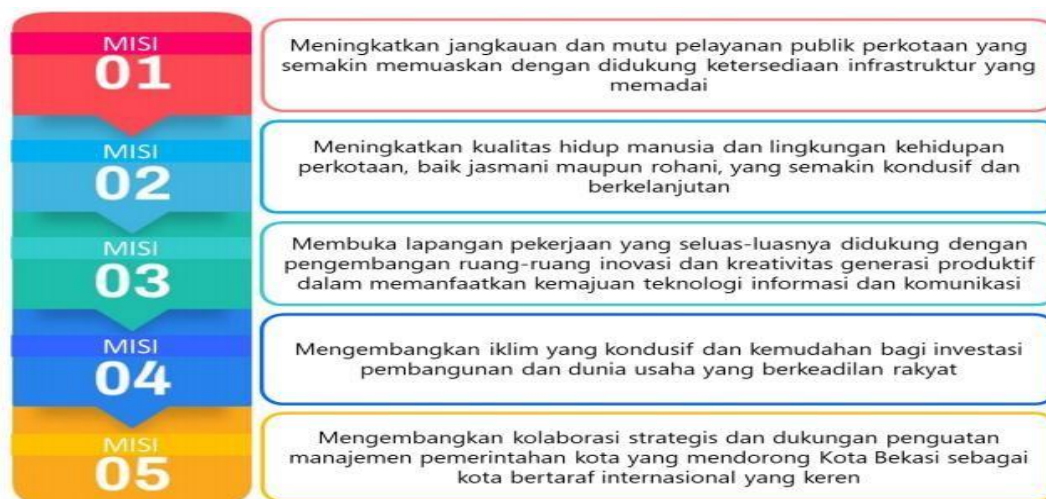
Gambar 10. Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jawa Barat Istimewa



Sumber data: Analisis Kecamatan Pondokgede, 2025

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 11. Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Ke-5 (lima) misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
- 2) Misi kedua berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
- 3) Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.
- 4) Misi keempat berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.
- 5) Misi kelima berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 12. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Misi ke-1, yaitu "Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai"**

Tujuan ke-1, yaitu: Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari.

Sasaran 1.1, yaitu: Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern.

2. **Misi ke-5 "Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren"**

Tujuan ke-5, yaitu: Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif.

Sasaran 5.1, yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.1.1 Tujuan Kecamatan Pondokgede

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pondokgede memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya Kecamatan Pondokgede, yaitu :

1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede.

Tujuan tersebut akan diukur melalui Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

3.1.2 Sasaran Kecamatan Pondokgede

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Pondokgede untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Pondokgede menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede, yaitu : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede, yaitu : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RJPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-						SUMBER DATA
				5	6					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	
1		Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.		85.53	85.70	85.90	86.00	86.20	86.40	86.60	
	Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		1.1 Meningkatkan LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik	Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik/ Jumlah total LKM x 100%	1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;	0%	70%	72.50%	75%	77.50%	79%	81.50%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		2.1 Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede	2.1.1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 4. Sub Bagian Tata Usaha.	1%	1.08%	1.09%	1.10%	1.11%	1.12%	1.13%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 16. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PONDOKGEDE DAN CASCADING KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE

NO	NSPK DAN SASARAN RJPMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASE LINE TAHUN N 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-						SUMBER DATA
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	
1		Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.		85.53	85.70	85.90	86.00	86.20	86.40	86.60	
	Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik	Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik/ Jumlah total LKM x 100%	1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;	0%	70%	72.50%	75%	77.50%	79%	81.50%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima		2.1 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede	2.1.1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 4. Sub Bagian Tata Usaha.	1%	1.08%	1.09%	1.10%	1.11%	1.12%	1.13%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**CASCADING KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE
TAHUN 2025-2029**

Visi Kota Bekasi	: Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
Misi Kota Bekasi	: Misi 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai Misi 5. Mengembangkan Kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.
Tujuan	: Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede
CAMAT PONDOKGEDE (Esselon III)	
Indikator Kinerja Utama (IKU) :	
Sasaran 1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

CASCADING KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE TAHUN 2025-2029

Sekretaris Kecamatan Pondokgede (Esselon III)	Lurah se-Kecamatan Pondokgede (Esselon IV)	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Esselon IV)	Kasi Pemerintahan (Esselon IV)	Kasi Kesejahteraan Sosial (Esselon IV)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Esselon IV)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Esselon IV)
Sasaran 1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede. Indikator Kinerja : Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede. Indikator Kinerja : Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede. Indikator Kinerja : Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan
Kasi Pemtibus Kelurahan (Esselon IV)	Kasi Permasbang Kelurahan(Esselon IV)	Kasi Kessos Kelurahan (Esselon IV)			Kasubag Tata Usaha (Esselon IV)	Kasubag Keuangan (Esselon IV)
Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede. Indikator Kinerja : Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan			Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

PARAF KOORDINASI

Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.2 Strategi Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2025–2029. Strategi disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, potensi yang dimiliki, serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Strategi-strategi ini diarahkan untuk memperkuat peran Kecamatan Pondokgede sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum dan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bekasi secara keseluruhan.

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pondokgede menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pondokgede mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagai dasar yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pondokgede;
- 2) Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;
- 4) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede;
- 5) Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

c. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
- 2) Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede;

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam tabel 17.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 17. Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
Analisis Lingkungan Internal (*Strenght & Weakness*)

Kekuatan (Strenght)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;	4
	2.	Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;	3
	3.	Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;	3
	4.	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;	3
	5.	Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;	3
	6.	Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.	2
		TOTAL	18

Kelemahan (Weakness)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan;	4
	2.	Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;	2
	3.	Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;	3
	4.	Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan	3
	5.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan	3
	6.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	2
		TOTAL	17

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Analisis Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

Peluang (Opportunity)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	3
	2.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah;	3
	3.	Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;	4
	4.	Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede;	3
	5.	Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede;	3
	TOTAL		16

Tantangan (Threat)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	3
	2.	Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	3
	3.	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede	3
	TOTAL		9

Skor diukur dari Skala:

- (1) Sangat Kecil;
- (2) Kecil;
- (3) Sedang;
- (4) Besar;
- (5) Sangat Besar.

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisis SWOT di atas, maka dapat diidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang diperlukan pada Kecamatan Pondokgede dapat dilihat pada table 18.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 18. Formulasi Strategi SWOT

	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
FAKTOR EKSTERNAL	1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data; 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah; 3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik; 4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede; 5. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede.	1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan; 2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat; 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede;
FAKTOR INTERNAL		
KEKUATAN (STRENGTH)	Strategi/Kebijakan S-O	Strategi/Kebijakan S-T

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas; 2. Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3. Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran	1. Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; 2. Pengintegrasian pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral) 3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan untuk bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (disruption adaptive).	1. Pengintegrasian sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 2. Koordinasi dengan Kemendagri terkait pengembangan dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
---	--	---

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan; 6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.		
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Strategi/Kebijakan W-O	Strategi/Kebijakan W-T
1. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan; 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis; 3. Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat; 4. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan; 5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.	1. Pemanfaatan sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan; 2. Pengintegrasian data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah. 3. Pengembangan sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan; 4. Penguatan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan.	1. Pengembangan ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif; 2. Penyediaan kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif; 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, pada tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan Kecamatan Pondokgede tahun 2025-2029.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 19. Strategi Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	1. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program; 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus LKM melalui pelatihan dan pendampingan; 3. Optimalisasi pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala.
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede	1. Memaksimalkan pelayanan siaga on area (pesona) dimana petugas pamor melayani masyarakat di lingkup RW; 2. Menyediakan sistem pengaduan digital (WhatsApp Business), media sosial serta SP4N Lapor; 3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM; 4. Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan Transparansi melalui forum diskusi antara pihak kecamatan

Sumber data: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan. Upaya mewujudkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran antara lain Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah, Pengembangan SDM aparatur yang compete, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas sangat memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun mulai 2025 sampai dengan 2029. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pondokgede menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pondokgede mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program RPJMD Kota Bekasi yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Pondokgede mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 20. Arah Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede

No	OPERASIONALISASI NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pondokgede	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai	Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika	1. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program; 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengurus LKM melalui pelatihan dan pendampingan; 3. Optimalisasi pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) secara berkala.	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren	Peningkatan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik di semua sektor yang ditangani	1. Penguatan pelaksanaan program Pesona (Pelayanan Siaga On Area) yang dilakukan oleh petugas Pantau Monitoring (Pamor) di setiap RW; 2. Penyediaan sistem pengaduan digital (WhatsApp Business), media sosial serta SP4N Lapor; 3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM; 4. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan Transparansi melalui forum diskusi antara pihak kecamatan dan perwakilan masyarakat; 5. Deteksi dini melalui forum diskusi pimpinan kecamatan dengan masyarakat setempat melalui Forkopimcam; 6. Kordinasi dan kerja sama pihak terkait melalui sinergitas tiga pilar.	
---	---	--	---	--

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3	Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	1. Penguatan komitmen dalam penerapan SAKIP; 2. Penerapan anggaran berbasis kinerja; 3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pembinaan tentang SAKIP kepada seluruh aparatur di Kecamatan Pondokgede.	
---	---	--	---	--

Sumber data: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 21. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	: Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede		
Sasaran	: 1. Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede	1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede	1. Meningkatkan LKM yang aktif untuk mendukung pelayanan publik 2. Meningkatkan penyelenggaraan layanan publik dan kualitas Sarana prasarana di bidang layanan masyarakat 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dan kelurahan 4. Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	Penguatan fungsi pemerintah melalui Zona Integritas, peningkatan SDM aparatur, manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik, saran dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberian apresiasi dan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan memkasimalkan sumber daya yang ada. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui penanganan tindak pelanggaran ketertiban dan sinergitas antara tiga pilar serta harmonisasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sumber :Diolah dari Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

3. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 7) Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 0 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagai dasar yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pondokgede;
- 8) Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 9) Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 10) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 11) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 12) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 7) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan;
- 8) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 9) Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;
- 10) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 11) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program- program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen- dokumen perencanaan;
- 12) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

4. Analisis Lingkungan Eksternal

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 6) Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
- 7) Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- 8) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 9) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede;
- 10) Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

c. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 4) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
- 5) Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
- 6) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede;

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berikut adalah Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Mebel;
 - 5.2. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 1.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;

1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

1.4. Evaluasi Kelurahan.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;

1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 22. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pondokgede Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		Gerakan Kobe Berkinerja
					Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		
		Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			- Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			- Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN Perangkat Daerah.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gerakan Kobe Berkinerja
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			- Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gerakan Kobe Berkinerja

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		
					Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		
			Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Gerakan Kobe Berkinerja
					Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening Baru)	
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Gerakan Kobe Hijau, Berkinerja
					Persentase LKM yang Aktif	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	
						Evaluasi Kelurahan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik		Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Gerakan Kobe Hijau, Berkinerja
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang Aktif	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	
						Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokgede			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Gerakan Kobe Berkinerja
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiwaringin)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatimakmur)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jaticempaka)	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening Baru)	
			Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan		Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Gerakan Kobe Berkinerja
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid. Urusan/Pr ogram/ Kegiatan/Su b.Kegiatan)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
						2025		2026		2027		2028		2029		2030							
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85.53	85.70		85.90		86		86.20		86.40		86.60		86.60		Camat		
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede					Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	1.08%		1.09%		1.10%		1.11%		1.12%		1.13%		1.13%		Camat	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	22.665.058.526	100%	22.677.507.424	100%	22.945.487.424	100%	22.945.487.42	100%	22.945.487.4	100%	137.124.515.646	Sekretaris Kecamatan			
						Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	96.63%	96.70%		96.90 %		97%		97.20%		97.40%		97.60%		97.60%		Sekretaris Kecamatan	
						Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	80	80.20		80.40		80.60		80.80		81		81.20		81.20		Sekretaris Kecamatan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegia tan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
								Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%		100%		100%		100%					100%			Sekretaris Kecamatan	
		7	0	01	2.01		Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Panganggaran	100%	100%	7.800.000	100%	28.395.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	156.195.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	0 Dokumen	0	3 Dokumen	13.395.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	15 Dokumen	73.395.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	6 Laporan	6 Laporan	7.800.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	26 Laporan	82.800.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegia tan)					PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGG UNG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		701	01	2.02		Administrasi i Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	16.223.751.000	100%	18.945.928.000	100%	18.945.303.000	100%	18.945.303.000	100%	18.945.303.000	100%	18.945.303.000	100%	110.950.891.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		701	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaG dan Tunjangan ASN	1484 OB	2319 OB	16.219.751.000	2319 OB	18.930.303.000	2319 OB	18.930.303.000	2319 OB	18.930.303.000	2319 OB	18.930.303.000	13914 OB	110.871.266.000	Kasubag TataUsaha	Kecamatan Pondokgede			
		701	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	15.625.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	6 Laporan	79.625.000	Kasubag TataUsaha	Kecamatan Pondokgede			
		701	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	100%	100%	102.338.800	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	202.338.800	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede			
		701	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	6 Unit	41.239.800	2 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	8 Unit	281.239.800	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede			
		701	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede			
		701	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	3 Orang	19.125.000	0 Orang	-	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	23 Orang	99.125.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede			

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)	(18)	(19)	(20)
		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	29 Orang	41.974.000	0 Orang	0	00 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	29 Orang	41.974.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokged
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	464.092.000	100%	460.000.00	100%	587.000.000	100%	587.000.000	100%	587.000.000	100%	587.000.000	100%	3.272.092.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokged
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	6 Paket	120.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokge de
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	262.092.000	3 Paket	250.000.000	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	3 Paket	280.000.000	19 Paket	1.632.092.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokge de
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	75.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	75.000.000	3 Paket	75.000.000	3 Paket	75.000.000	3 Paket	75.000.000	18 Paket	425.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokge de
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokge de

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)						PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
											2025		2026		2027		2028		2029						2030	
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	12.000.000	0	0	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	60	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	25.000.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	72	645.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	72	120.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	72.205.000	100%	215.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.287.205.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	4 Unit	28.756.000	56 Unit	15.000.000	56 Unit	50.000.000	56 Unit	50.000.000	56 Unit	50.000.000	56 Unit	50.000.000	284 Unit	243.756.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	4 Unit	43.449.000	29 Unit	200.000.000	29 Unit	200.000.000	29 Unit	200.000.000	29 Unit	200.000.000	29 Unit	200.000.000	149 Unit	1.043.449.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	5.278.058.226	100%	2.460.184.424	100%	2.465.184.424	100%	2.465.184.424	100%	2.465.184.424	100%	2.465.184.424	100%	17.598.980.346	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2025		2026		2027		2028		2029		2030							
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	N/A	12 Laporan	5.000.000	0 Laporan	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	60 Laporan	25.000.000			Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	430.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	450.000.000	72 Laporan	2.680.000.000			Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.843.058.226	12 Laporan	2.010.184.424	12 Laporan	2.010.184.424	12 Laporan	2.010.184.424	12 Laporan	2.010.184.424	12 Laporan	2.010.184.424	72 Laporan	14.893.980.346			Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	516.813.500	100%	548.000.000	100%	648.000.000	100%	648.000.000	100%	648.000.000	100%	648.000.000	100%	3.656.813.500			Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	12 Unit	648.000.000			Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI			
										2025		2026		2027		2028		2029						2030		
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	34 Unit	38 Unit	165.000.000	32 Unit	165.000.000	32 Unit	165.000.000	32 Unit	165.000.000	32 Unit	165.000.000	32 Unit	165.000.000	198 Unit	990.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit	108 Unit	43.813.500	80 Unit	75.000.000	80 Unit	75.000.000	80 Unit	75.000.000	80 Unit	75.000.000	80 Unit	75.000.000	508 Unit	418.813.500	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	300.000.000	36 Unit	1.600.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85.53	85.70		85.90		86		86.20		86.40		86.60		86.60			Camat	
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede							Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	0%	70%		72.50%		75%		77.50%		79%		81.50%		81.50%			Camat	
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	100%	100%	17.650.469.800	100%	19.503.237.000	100%	19.578.237.000	100%	19.578.237.000	100%	19.578.237.000	100%	19.578.237.000	100%	115.466.654.800	camat	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100%	100%	17.330.469.800	100%	19.223.237.000	100%	19.248.237.000	100%	19.248.237.000	100%	19.248.237.000	100%	19.248.237.000	100%	113.546.654.800	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	3	2.02	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	731 Lembaga Masyarakat	731 Lembaga Masyarakat	150.000.000	731 Lembaga Masyarakat	145.000.000	731 Lembaga Masyarakat	150.000.000	731 Lembaga Masyarakat	150.000.000	731 Lembaga Masyarakat	150.000.000	731 Lembaga Masyarakat	4386 Lembaga Masyarakat	895.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatiwaingin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatimakmur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatibening)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jaticempaka)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatibening Baru)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan JatibeningBaru

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGL NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Pokmas/ Ormas	165 Pokmas/ Ormas	182.400.000	165 Pokmas / Ormas	187.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	990 Pokmas / Ormas	1.199.605.000	Kasi Pemberda yaan Masyarakat dan Kasi Kesos	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatiwaringin)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Pokmas/ Ormas	165 Pokmas/ Ormas	3.167.092.600	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	990 Pokmas /Ormas	20.880.884.600	Kasi Permasba ng Kelurahan, Kasi Pemtibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatimakmur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233 Pokmas/ Ormas	233 Pokmas/ Ormas	4.634.028.600	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	1398 Pokmas /Ormas	30.437.404.600	Kasi Permasba ng Kelurahan, Kasi Pemtibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatibening)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	152 Pokmas/ Ormas	152 Pokmas/ Ormas	2.903.105.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	912 Pokmas /Ormas	19.246.185.000	Kasi Permasba ng Kelurahan, Kasi Pemtibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegia tan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jaticempaka)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164 Pokmas/ Ormas	164 Pokmas/ Ormas	2.937.265.400	164 Pokmas/ Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/ Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/ Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/ Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/ Ormas	3.303.557.600	984 Pokmas/ Ormas	19.455.053.400	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus,Kasi KesosKelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatibenin g Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112 Pokmas/ Ormas	112 Pokmas/ Ormas	2.306.578.200	112 Pokmas/ Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/ Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/ Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/ Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/ Ormas	2.565.188.800	672 Pokmas/ Ormas	15.132.522.200	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus, Kasi Kesos Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru
		7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	6 Laporan	300.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100%	100%	320.000.000	100%	280.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	1.920.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyar akatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyar akatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyar akatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru
		7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	72 Laporan	720.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85.53	85.70		85.90		86		86.20		86.40		86.60		86.60		Camat	
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede							Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	1.08%		1.09%		1.10%		1.11%		1.12%		1.13%		1.13%		Camat	
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	240.000.000	100%	280.000.000	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	2.000.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	210.000.000	100%	260.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	1.830.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokume n	60.000.00 0	12 Dokume n	90.000.000	12 Dokume n	90.000.000	12 Dokume n	90.000.000	12 Dokume n	90.000. 000	72 Dokume n	480.000.000	Kasi Pemerintaha n	Kecamatan Pondokgede
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokume n	40.000.00 0	12 Dokume n	50.000.000	12 Dokume n	50.000.000	12 Dokume n	50.000.000	12 Dokume n	50.000. 000	72 Dokume n	270.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur		
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokume n	40.000.00 0	12 Dokume n	50.000.000	12 Dokumer	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokume n	50.000. 000	72 Dokume n	270.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokume n	40.000.00 0	12 Dokume n	50.000.000	12 Dokumer	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokume n	50.000. 000	72 Dokume n	270.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru
		7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000. 000	100%	170.000.000	Kecamatan Pondokgede	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANG GU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Kewenanga n Lain yang Dilimpahka n	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	6 Laporan	170.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85.53	85.70		85.90		86		86.20		86.40		86.60		86.60		Camat	
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede							Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	1.08%		1.09%		1.10%		1.11%		1.12%		1.13%		1.13%		Camat	
		7	1	4			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.252.675.000	100%	1.148.000.000	100%	1.336.125.000	100%	1.336.125.000	100%	1.336.125.000	100%	1.336.125.000	100%	7.745.175.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib	100%	100%	1.252.675.000	100%	1.148.000.000	100%	1.336.125.000	100%	1.336.125.000	100%	1.336.125.000	100%	1.336.125.000	100%	7.745.175.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas engan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	64.500.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	72 Laporan	634.500.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pondokgede
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	352.175.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	358.125.000	12 Laporan	358.125.000	12 Laporan	358.125.000	12 Laporan	358.125.000	72 Laporan	2.034.675.000	Seksi Kessos Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	72 Laporan	938.400.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatiwaringin	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
											2025		2026		2027		2028		2029						2030	
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	192.400.000	12 Laporan	192.400.000	12 Laporan	192.400.000	12 Laporan	192.400.000	12 Laporan	192.400.000	12 Laporan	192.400.000	72 Laporan	1.154.400.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur	
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan denganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	72 Laporan	938.400.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening	
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	72 Laporan	1.190.400.000	Seksi Kessos Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan TokohAgama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	72 Laporan	866.400.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede							Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	1.08%		1.09%		1.10%		1.11%		1.12%		1.13%		1.13%		Camat	
		7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan	100%	100%	39.350.000	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	259.350.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase PenangananKasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	39.350.000	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	259.350.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peratutan-Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	39.350.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	100%	50.000.000	72 Laporan	259.350.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pondokgede
TOTAL ANGGARAN											41.847.553.326		43.628.744.424		44.279.849.424		44.279.849.424		44.279.849.424		44.279.849.424		262.595.695.446		

Sumber : Data Tata Usaha Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.1 PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

Program Prioritas Pembangunan daerah dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi mempunyai 7 Program dalam percepatan pembangunan Kota Bekasi antara lain :

- Gerakan Kobe Sehat;
- Gerakan Kobe Cerdas;
- Gerakan Kobe Hijau;
- Gerakan Kobe Berkarya;
- Gerakan Kobe Menarik;
- Gerakan Kobe Bersinergi;
- Gerakan Kobe Berkinerja

Sapta Program Kota Bekasi adalah cermin lokal dari semangat Asta Cita dan Jabar Istimewa, dengan penyesuaian konteks Kota urban, Kesamaan substansi ketiganya yaitu :

1. Berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif;
2. Berbasis pada nilai gotong royong dan kolaborasi;
3. Fokus pada digitalisasi dan Inovasi;
4. Memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
5. Sinergi vertikal antar level pemerintahan.

Kesamaan substansi ini penting untuk menjamin sinkronisasi perencanaan, memudahkan akses pendanaan, dan memastikan kesesuaian arah pembangunan antar tingkat pemerintahan. Berikut adalah Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang pendukung program prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2025- 2029, yaitu :

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

I. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 4. Evaluasi Kelurahan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Untuk menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 23. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Gerakan Kobe Berkinerja
			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening Baru)	
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Gerakan Kobe Hijau,Berkinerja
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	
			Evaluasi Kelurahan	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	PROGRAM PRIRITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	4	7	8
2	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung Pelayanan Publik	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Gerakan Kobe Hijau,Berkinerja
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatiwaringin)	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatimakmur)	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatibening)	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jaticempaka)	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jatibening Baru)	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											2025		2026		2027		2028		2029		2030					
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
																							(21)	(22)		
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85.53	85.70		85.90		86		86.20		86.40		86.60		86.60		Camat		
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan Pondokgede							Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	1%	1.08%		1.09%		1.10%		1.11%		1.12%		1.13%		1.13%		Camat		
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	240.000.000	100%	280.000.000	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	2.000.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	210.000.000	100%	260.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	1.830.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	90.000.000	72 Dokumen	480.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/P rogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananUmum (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	72 Dokumen	270.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru
		7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	170.000.000	Kecamatan Pondokgede	Kecamatan Pondokgede
		7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	6 Laporan	170.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiatan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokgede							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	85.53	85.70		85.90		86		86.20		86.40		86.60		86.60		Camat		
	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokgede						Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	0%	70%		72.50%		75%		77.50%		79%		81.50%		81.50%		Camat		
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat DesaDan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik	100%	100%	17.650.469.800	100%	19.503.237.000	100%	19.578.237.000	100%	19.578.237.000	100%	19.578.237.000	100%	19.578.237.000	100%	115.466.654.800	camat	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif	100%	100%	17.330.469.800	100%	19.223.237.000	100%	19.248.237.000	100%	19.248.237.000	100%	19.248.237.000	100%	19.248.237.000	100%	113.546.654.800	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.02	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	731 Lembaga Kemasyarakatan	731 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	731 Lembaga Kemasyarakatan	145.000.000	731 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	731 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	731 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	4386 Lembaga Kemasyarakatan	895.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede		

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatiwaingin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatimakmur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatibening)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jaticempaka)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatibening Baru)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	1.200.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan JatibeningBaru

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiata n)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Pokmas/ Ormas	165 Pokmas/ Ormas	182.400.000	165 Pokmas / Ormas	187.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	165 Pokmas / Ormas	207.441.000	990 Pokmas / Ormas	1.199.605.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat at dan Kasi Kesos	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatiwaringin)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165 Pokmas/ Ormas	165 Pokmas/ Ormas	3.167.092.600	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	165 Pokmas /Ormas	3.542.758.400	990 Pokmas /Ormas	20.880.884.600	Kasi Permasba ng Kelurahan, Kasi Pemtibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatimakmur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233 Pokmas/ Ormas	233 Pokmas/ Ormas	4.634.028.600	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	233 Pokmas /Ormas	5.160.675.200	1398 Pokmas /Ormas	30.437.404.600	Kasi Permasba ng Kelurahan, Kasi Pemtibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatibening)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	152 Pokmas/ Ormas	152 Pokmas/ Ormas	2.903.105.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	152 Pokmas / Ormas	3.268.616.000	912 Pokmas /Ormas	19.246.185.000	Kasi Permasba ng Kelurahan, Kasi Pemtibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegia tan)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2025		2026		2027		2028		2029						2030	
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					TARGET	PAGU (Rp)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jaticempaka)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	164 Pokmas/Ormas	164 Pokmas/Ormas	2.937.265.400	164 Pokmas/Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/Ormas	3.303.557.600	164 Pokmas/Ormas	19.455.053.400	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus,Kasi KesosKelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka
		7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatibenin g Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112 Pokmas/Ormas	112 Pokmas/Ormas	2.306.578.200	112 Pokmas/Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/Ormas	2.565.188.800	112 Pokmas/Ormas	2.565.188.800	672 Pokmas/Ormas	15.132.522.200	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus, Kasi Kesos Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru
		7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	6 Laporan	300.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LKM yang aktif	100%	100%	320.000.000	100%	280.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	1.920.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/Pr ogram/ Kegiatan/Sub. Kegiatan)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNITKERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2025		2026		2027		2028		2029		2030							
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakan	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening			
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakan	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka			
		7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakan	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakan	40.000.000	12 Lembaga Kemasyarakan	240.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru			
		7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah LaporanFasilitasi PengembanganUsaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	72 Laporan	720.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	Kecamatan Pondokgede			
TOTAL ANGGARAN												17.890.469.800		19.783.237.000		19.948.237.000		19.948.237.000		19.948.237.000		117.466.654.800						

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada periode Rencana Strategis. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 24 dan Tabel 25 berikut.

Tabel 24. Indikator Kinerja Utama Kcamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	BaseLine Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase LKM Aktif yang mendukung Pelayanan Publik	Persentase	0%	70%	72.50%	75%	77.50%	79%	81.50%	81.50%
2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persentase	1%	1.08%	1.09%	1.10%	1.11%	1.12%	1.13%	1.13%

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 25. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan
Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota
Bekasi Tahun 2025-2030**

NO	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	meningkatkan Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Pondokgede. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Kecamatan Pondokgede dalam Renstra telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Dalam hal ini masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya memiliki peran dalam mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

PARAF KOORDINASI	
Camat Pondokgede	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel sehingga dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Pondokgede.

Bekasi, 29 Agustus 2025
CAMAT PONDOKGEDE

ZAINAL ABIDIN SYAH, S.T., M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19720616 199903 1 008